



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG APRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO ADVOKASI**
3. NHK : **131280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.203.047.350**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 8.505.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 180.180.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 180.180.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.219.575.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 471.900.000
6. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 52.035.200
7. Tanah Seluas 2.821 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 14.246.050
8. Tanah Seluas 2.854 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.406.100
9. Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 22.560.000
10. Tanah Seluas 2.066 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.660.000
11. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI



Rp. 12.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

178.000.000

1. LAINNYA, --- (3 BUAH SEPEDA) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T / MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

1.904.770.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

342.695.459

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

4.628.512.809

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.628.512.809

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERY SUBAGIYO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 153150

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 850.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Bangunan Seluas 1.644 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 258.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SE88/MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU ALL NEW SIRION Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 50.400.000**

D. SURAT BERTAHAPAN **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.162.400.000**

III. HUTANG **Rp. 40.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.122.400.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADITYARINI PRANAWENGRUM
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA II
3. NHK : 996161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	206.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA/NF125 SD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
3. MOBIL, HONDA FREED/GB3 1.5E Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.840.242
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.008.840.242
III. HUTANG	Rp.	583.232.896
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	425.607.346

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHANIAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK : 98642

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	12.000.000
1. MOTOR, HONDA H1B02N41L0 A/T / SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	501.529.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.697.834
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.007.226.834
III. HUTANG	Rp.	373.072.016
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	634.154.818

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN HENDRO CAHYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI**
3. NHK : **912693**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/105 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **296.100.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.600.000
3. MOTOR, HONDA CT70 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 12.400.000
6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 16.600.000
7. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 14.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **49.700.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	94.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.139.800.000
III. HUTANG	Rp.	250.588.269
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.889.211.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI PURWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 996167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.034.840
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	837.034.840
III. HUTANG	Rp.	699.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	138.034.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ROFIQ KHAMDANI YUSUF
- Jabatan** : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PARE
PARE
- NHK** : 767267

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.042.590.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 729.590.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- Tanah Seluas 1.425 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 93.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.500.000

- MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, HONDA BRV E-CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 593.787.704

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.823.177.704

III. HUTANG Rp. 145.800.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.677.377.704

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PURNOMO**
2. Jabatan : **PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA**
3. NHK : **767079**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.666.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 616 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1.600 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 1.497 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/160 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 646.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **304.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV HRV MANUAL 1500 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.970.600.000
III. HUTANG	Rp.	740.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.230.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TONI KURNIAWAN
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MUDA
3. NHK : 786616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000		
2. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , Rp. 120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	114.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	331.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	51.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.449.400.000
III. HUTANG	Rp.	550.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	899.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAIZAL FAHMI
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PERTAMA
3. NHK : 867758

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	85.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	85.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG WIDI CAHYONO**
2. Jabatan : **PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PERTAMA**
3. NHK : **766369**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.188.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.688.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 475.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B65 AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BYS A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000



8. MOTOR, HONDA HONDA GL 200 R Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000
9. MOTOR, HONDA TIGER 2000/GL200 SPORT Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 16.000.000
10. MOTOR, HONDA HONDA ASTREA C100 Tahun 1997, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
11. MOTOR, HONDA TIGER 2000/GLS200 SPORT Tahun 2005,
HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.154.966
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.729.654.966
III. HUTANG	Rp.	750.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.979.654.966

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN JUANDA NOMOR 6, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124;
TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-14/WKN.13/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Sugeng Apriyanto;
jabatan : Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara;

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Andi Priyananda
Jabatan : Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama
Unit Kerja : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Belum termasuk kategori wajib lapor pada tahun 2025 sehingga LHKPN atas nama Pegawai tersebut tidak tersedia.

Surat keterangan ini diberikan guna keperluan pemenuhan dokumen pendukung *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat II 2026 khususnya pada dokumen LHKPN Pejabat Eselon III/setingkat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 21 Mei 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Apriyanto



